

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu tempat destinasi favorit para wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. DIY yang terkenal dengan tagline “Jogja Istimewa” ini memiliki banyak obyek wisata serta budaya. Setiap kabupaten/kota di DIY terdapat tempat wisata yang beragam. DIY sendiri terdapat beberapa obyek wisata, mulai dari wisata alam, budaya, sejarah, agama dan masih banyak lagi (Syakdiah, 2017). Pada obyek wisata alam, DIY mempunyai Gunung Merapi, Puncak Suroloyo, Bukit Manoreh, Pantai Krakal, Pantai Parangtritis, dll. Pada obyek wisata budaya dan sejarah DIY memiliki Museum Vredeburg, Candi Prambanan, Candi Ratu Boko, Keraton Kasultanan Yogyakarta, dll. Obyek wisata agama di DIY memiliki Masjid Gede (Putra, 2016). Obyek wisata sendiri menurut Chafid Fandeli (2000:58) dalam (Ian, 2016) merupakan wujud nyata dari ciptaan manusia, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat yang memiliki daya tarik tersendiri untuk di kunjungi oleh wisatawan.

Mulai tahun 2016 di DIY mulai bermunculan wisata-wisata buatan yang unik. Ide-ide unik masyarakat serta pemerintah daerah dalam menciptakan wisata- wisata baru mulai beragam. Melihat banyaknya tempat wisata di DIY ini membuat wisatawan dengan mudah untuk mengunjungi destinasi-destinasi yang di inginkan di dalam suatu daerah.

DIY yang terkenal akan kesederhanaan dan berhati nyaman terkadang pula membuat wisatawan yang sudah pernah berkunjung ke DIY ingin kembali

(Sulistya, 2016). Maka dari itu pemerintah DIY sendiri khususnya Dinas Pariwisata DIY mengambil kesempatan ini untuk menjadikan DIY sebagai destinasi berlibur utama di Indonesia. Setiap tahun nya Dinas Pariwisata DIY sendiri selalu membuat target jumlah wisatawan yang datang ke DIY. Seperti yg dijelaskan oleh Kepala Dinas Pariwisata DIY pada koran *Tribun* bahwa pada tahun 2017 Dinas Pariwisata menargetkan 4,5 juta wisatawan serta tahun 2018 dinaikan 4,9 juta wisatawan (Tribun Jogja. 2 Febuari 2018). Dalam meningkatkan target jumlah wisatawan, Dinas Pariwisata DIY melihat data kunjungan wisatawan di DIY, yang berdasarkan data tersebut setiap tahunnya meningkat, berikut data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara di DIY dimulai tahun 2013 hingga 2017 seperti (Dinas Pariwisata DIY, 2017) :

Tabel 1. 1 Data wisatawan mancanegara dan nusantara di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2013 – 2017

No	Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara	Jumlah Wisatawan Mancanegara & Nusantara	Pertumbuhan Wisatawan Mancanegara & Nusantara
1	2013	235.893	2.602.074	2.837.967	20,24 %
2	2014	254.213	3.091.967	3.346.180	17,91 %
3	2015	308.485	3.813.720	4.122.205	23,19 %
4	2016	355.313	4.194.261	4.549.574	10,37 %
5	2017	397.951	4.831.347	5.229.298	14,94 %

Sumber ; Visisting jogja.com tahun 2017

Berdasarkan data di atas dimana mulai tahun 2013 hingga 2017 jumlah kunjungan wisatawan di DIY selalu mengalami peningkatan, walau jika di

persentase kan naiknya tidak stabil. Maka dari itu Dinas Pariwisata DIY menaikan target wisatawan tahun selanjutnya. Kita lihat dari makin bertambahnya jumlah destinasi wisata di DIY sendiri yang semakin meningkat maka Dinas Pariwisata DIY memastikan bahwa jumlah wisatawan pun akan meningkat setiap tahunnya (*tribunjogja.com, 2 Febuari 2018*).

Kabupaten Sleman merupakan salah satu tempat di DIY yang memiliki obyek wisata beragam. Pada Kabupaten Sleman terdapat obyek wisata berupa Candi, Museum, Agrowisata. Pada tahun 2016 Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang memiliki obyek wisata terbanyak, dimana Kabupaten Sleman terdapat 31 tempat wisata, sedangkan Kota Yogyakarta terdapat 25 tempat, Bantul sebanyak 16 tempat, Kulon Progo sebanyak 14 tempat, dan Gunung Kidul sebanyak 11 tempat (Atun, 2017).

Kabupaten Sleman memiliki banyak obyek wisata sejarah berupa Candi, mulai Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Ratu Boko dll. Menurut Daniel (2009) candi merupakan bangunan tempat ibadah yang merupakan peninggalan masa lalu yang berasal dari agama hindu dan budha. Kata candi juga tidak hanya digunakan untuk penyebutan tempat ibadah, namun istana, pemandian gapura, dan lain-lain. Banyak sejarah budaya yang terdapat di candi tersebut sehingga banyak wisatawan lokal maupun luar yang ingin berkunjung sekedar mengetahui sejarah budaya pada candi tersebut ataupun ingin menikmati indahnya bangunan-bangunan candi tersebut. Pada tahun 2016 hingga 2017 jumlah wisatawan yang datang untuk berkunjung pada bangunan candi-candi yang

terdapat di Kabupaten Sleman adalah :

Tabel 1. 2 Data jumlah wisatawan yang berkunjung di obyek wisata candi di Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2017

No	Obyek Wisata	Jumlah wisatawan 2016	Jumlah wisatawan 2017	Jumlah
1	Candi Prambanan	2.095.128	2.175.559	4.270.687
2	Candi Kalasan	3.740	4.398	8.138
3	Candi Sari	6.350	4.866	11.216
4	Candi Gebang	1.329	1.113	2.442
5	Candi Ijo	47.203	166.155	213.358
6	Candi Banyu Nibo	2.742	2.323	5.065
7	Candi Barong	7.205	7.541	14.746
8	Candi Ratu Boko	349.917	366.201	716.118
9	Candi Sambisari	56.209	88.781	144.990
Jumlah		2.569.823	2.816.937	5.386.760

Sumber; Visisting jogja.com Tahun 2016

Melihat semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sleman maka Pemerintah Daerah Sleman ataupun pengelola wisata khususnya obyek wisata bersejarah berupa candi mulai memikirkan mengenai sarana dan prasarana yang dapat membuat wisatawan yang berkunjung agar lebih nyaman ketika berkunjung ke tempat wisata candi di Kabupaten Sleman. Wisatawan yang berkunjung di Sleman tidak hanya masyarakat normal yang tidak memiliki kelebihan namun juga ada masyarakat yang dikatakan difabel. Difabel sendiri merupakan singkatan dari *Different Ability People* atau dapat dikatakan orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda (Putri, 2011).

Pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

ditegaskan bahwa difabel merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga

memiliki kedudukan hak, kewajiban, dan peran yang sama, serta mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Seperti yang di jelaskan pada UU Nomor 4 Tahun 1997 pasal 6 angka 5 tentang Penyandang Cacat bahwa difabel berhak memperoleh aksesibilitas dalam rangka kemandirian bagi dirinya. Pada pasal 1 angka (9) Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 juga diatur lebih spesifik mengenai Pembangunan Kepariwisata perihal Aksesibilitas yang berbunyi :

”Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi. Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata”

Maka dari itu masyarakat difabel juga harus mendapatkan hak dalam hal sarana dan prasarana di tempat wisata guna membangun kemandirian difabel. Kabupaten Sleman merupakan satu-satunya kabupaten di DIY yang mengatur mengenai hak untuk memperoleh fasilitas di bangunan umum bagi difabel, dengan memberlakukan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan bagi Difabel. Dengan adanya Perda ini maka sesungguhnya hak difabel untuk mendapatkan sarana dan prasarana ramah difabel pada bangunan umum (khususnya bangunan wisata) akan dapat terpenuhi. Sehingga difabel akan dengan mudah mengakses obyek wisata di Kabupaten Sleman.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman bertugas untuk memonitoring dan mengevaluasi instansi pemerintah ataupun swasta dalam melaksanakan Perda

Sleman Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas pada Bangunan

Umum dan Lingkungan bagi Difabel. Hal ini berguna untuk mewujudkan hak-hak difabel dan kemandirian difabel pada bangunan umum dan lingkungan di lingkungan Kabupaten Sleman. Untuk menjalankan hal ini Pemerintah daerah Kabupaten Sleman membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang mengelola bangunan umum dan lingkungan di Kabupaten Sleman. Salah satunya yaitu PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko unit Ratu Boko. PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko unit Ratu Boko yang berlokasi di lingkungan Kabupaten Sleman harus mendukung dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menerapkan Perda Sleman Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan bagi Difabel. Bentuk dukungan dan kerjasama PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko unit Ratu Boko mengadakan sarana dan prasarana yang ramah akan difabel pada obyek wisata bersejarah Candi Ratu Boko guna memenuhi hak-hak difabel dan mewujudkan kemandirian bagi difabel dalam berwisata. Hal ini dijelaskan pada Perda Sleman No 11 Tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan bagi Difabel pada pasal 6 ayat (2) bahwa:

“Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan umum dan lingkungan wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas umum”

Bangunan sejarah budaya seperti Candi Ratu Boko merupakan salah satu bangunan yang dijadikan obyek wisata favorit di Kabupaten Sleman. Candi Ratu Boko merupakan salah satu candi yang terletak di Kabupaten Sleman yang

menjadi situs warisan dunia serta dilindungi oleh UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*), maka situs ini terlindungi dari berbagai situasi termasuk peperangan dan rehabilitasi bencana (Badar, 2012). Dijelaskan pada tabel 1.2 mengenai jumlah wisatawan Candi di Kabupaten Sleman, bahwasanya pada tahun 2016-2017 Candi Ratu Boko merupakan obyek wisata candi yang terdapat di Sleman yang jumlah pengunjungnya paling banyak kedua setelah Candi Prambanan.

Candi Ratu Boko menjadi salah satu destinasi primadona saat ini di Kabupaten Sleman. Candi ini menjual destinasi wisata pesona matahari terbenam. Pemandangan alam saat matahari terbenam ini yang menjadikan wisatawan ingin berkunjung ke Candi Ratu Boko, karena pemandangan sunset yang mengarah serong di candi ini tidak ditemukan di bangunan candi lainnya khususnya di Kabupaten Sleman. Lokasi candi yang terdapat di perbukitan yang menjadikan wisatawan dapat menikmati keindahan alam dari atas dengan pemandangan Candi Prambanan dan Gunung Merapi. Lokasi yang jauh dari perkotaan dan padatnya jalanan membuat kesan tenang dan nyaman serta tidak bising akan suara hiruk pikuk perkotaan yang akhirnya menjadikan destinasi wisata ini menjadi buruan wisatawan normal dan wisatawan difabel. Kondisi bangunan yang berbeda dimana jika situs-situs budaya lainnya biasanya berupa candi atau kuil, namun Candi Ratu Boko seperti istana (Pramudita, 2013).

Lokasi Candi Ratu Boko yang terletak di perbukitan merupakan salah satu permasalahan yang menjadikan obyek wisata ini kurang bisa diakses wisatawan

difabel. Kondisi tanah yang tidak datar hal ini yang membuat pembangunan

sarana dan prasarana bagi difabel kurang maksimal. Pada obyek wisata Candi Ratu Boko wisatawan yang menggunakan kendaraan berupa bus harus parkir dibawah dan wisatawan harus naik ke atas melalui tangga yang cukup tinggi.

Tangga di bangunan Candi Ratu Boko berbatu dan tidak rata, masih terdapat lubang-lubang di tangga. Namun tangga di area luar candi rata tidak berlubang. Pada tempat ini terdapat 3 toilet untuk umum yaitu dua terletak di area luar ,di samping kanan dan kiri restaurant, lalu satu lagi terletak pada area dalam. Obyek wisata ini juga memiliki satu restaurant bertaraf international yang terletak di area luar. Wisatawan yang berkunjung juga dapat membeli souvenir khas dari Candi Ratu Boko pada toko souvenir yang terdapat di area luar. Ruang informasi dan kantor pengelolaan obyek wisata Candi Ratu Boko terdapat di area luar. Pada area dalam terdapat fasilitas musholah yang tidak terlalu besar serta di area dalam juga terdapat bangunan candi serta goa. Untuk lokasi candi dan goa ini terletak lebih tinggi dari pada bangunan atau fasilitas yang tersedia lainnya (PT. TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko tahun 2018).

Melihat jumlah antusias wisatawan untuk berkunjung ke Candi Ratu Boko dan melihat sarana dan prasarana yang tersedia ini masih dianggap kurang ramah akan difabel, maka penelitian tertarik ingin meneliti bagaimana sarana dan prasarana ramah difabel di Candi Ratu Boko melihat antusiasnya jumlah wisatawan yang cukup banyak. Peneliti ingin melihat apakah Perda Sleman Nomor 11 tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas Bangunan Umum dan Lingkungan bagi Difabel sudah diberlakukan dengan baik atau belum oleh pengelola obyek wisata Candi

Ratu Boko, dimana sebagian pengelola obyek wisata yang berlokasi di Kabupaten

Sleman maka kebijakan ini seharusnya dilaksanakan dengan memenuhi sarana dan prasarana ramah difabel pada obyek wisata Candi Ratu Boko.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana pengadaan sarana dan prasarana ramah difabel pada tempat wisata Candi Ratu Boko di Kabupaten Sleman tahun 2017-2018 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi bagaimana pengadaan sarana dan prasarana ramah difabel pada tempat wisata Candi Ratu Boko di Kabupaten Sleman pada tahun 2017-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, berikut manfaat tersebut yaitu :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan menjadi bahan pengetahuan untuk referensi bagi peneliti mengenai evaluasi sarana dan prasarana bagi difabel pada tempat wisata khususnya wisata Candi Ratu Boko di kemudian hari.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Memberikan pemahaman kepada peneliti mengenai keadaan yang riil mengenai keadaan sarana dan prasarana bagi difabel di tempat wisata Candi Ratu Boko

b. Bagi Pemerintah & Pengelola Candi Ratu Boko

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi serta masukan bagi pemerintah dan pengelola yang menaungi pariwisata Candi Ratu Boko pengadaan sarana dan prasarana ramah difabel.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat menjadikan referensi serta gambaran untuk masyarakat difabel atau masyarakat yang mempunyai keluarga difabel mengenai keadaan sarana dan prasarana di Candi Ratu Boko.

d. Bagi Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu serta menjadi referensi bagi ilmu pengetahuan pelayanan public khususnya mengenai sarana dan prasarana ramah difabel pada Candi Ratu Boko.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan (Hukum, 2009).

Tabel 1.3 Literatur Review

No	Judul	Penulis	Isi	Jurnal
----	-------	---------	-----	--------

1	Evaluasi Ketersediaan Fasilitas dan Akseibilitas bagi Penyandang Cacat pada Gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang	Wardani C.F., dkk	Kesesuaian fasilitas Penyandang Cacat yang diatur oleh Peemen PU No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Akseibilitas pada bangunan gedung dimana pada pasal-pasalnya telah diatur	Journal of public policy and management review Vol;4 (2015)
---	---	-------------------	--	---

			<p>bahwa semua bangunan publik mewajibkan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi difabel. Melihat hal ini maka difabel merasa haknya terpenuhi untuk mendapatkan fasilitas di bangunan gedung dan lingkungan, seperti pada bangunan BPJS Semarang. Pada bangunan ini fasilitas yang berdasarkan permen PU No 30 Tahun 2006 sudah cukup maksimal pengadaanya, walaupun masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan itu. Ternyata pada pembangunan gedung BPJS Kota Semarang ini pihak dari BPJS Semarang membuat aturan sendiri mengenai perencanaan pembangunan fasilitas yang aksesibilitas di gedung tersebut.</p>	
--	--	--	--	--

2	Pariwisata Ramah Penyandang Disabilitas (studi Ketersediaan Fasilitas dan aksesibilitas Pariwisata Untuk Disabilitas di Kota Yogyakarta.	Zakiah,U., & Rahmawati,H.	Penelitian ini meneliti di 4 (empat) tempat wisata di Kota Yogyakarta, yaitu, Malioboro, Taman Pintar, Keraton, dan Taman Sari. Pada keempat tempat ini di temukan bahwa fasilitas serta aksesibilitas bagi pariwisata di Kota Yogyakarta sendiri masih kurang berdasarkan wawancara dari 100 orang wisatawan difabel, dikarenakan di kota jogja	UMY Vol;3 (2016)
---	--	---------------------------	--	------------------

			pada tahun 2016 belum ada peraturan yang mengatur mengenai obyek wisata yang harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas.	
3	Paket Wisata Bagi Difabel di Yogyakarta	Handoyono, Febri., dkk.	Masyarakat memerlukan aksesibilitas berwisata mulai perjalanan dari penginapan hingga obyek wisata. Salah satu kebutuhan aksesibilitas itu terdapat di Kota Yogyakarta. Pelayanan publik seperti Biro perjalanan di Kota Yogyakarta belum ada yang memiliki jasa perjalanan untuk penyandang difabel. Mereka beralasan minimnya tamu penyandang difabel yang membuat mereka untuk tidak mengadakan jasa perjalanan wisata khusus bagi difabel. Sehingga sekarang ini di Jogja, jasa Biro Perjalanan wisata masih belum ada yang mempunyai fasilitas maupun tujuan perjalanan khusus bagi difabel.	Jurnal pariwisata terapan Vol;1 (2017)
4	Aksesibilitas bagi Difabel pada Bangunan Masjid	Retyaka, A., dkk	Masjid Al Aqsa Klaten mulai mendirikan Permen Pu No 30/PRT/2006 mengenai aksesibilitas bagi difabel di bangunan gedung dan lingkungan. Bangunan umum seperti masjid merupakan bangunan gedung umum yang wajib menerapkan	Jurnal arsitektur, bangunan, & lingkungan Vol;7 (2018)

			peraturan Permen Pu No	
--	--	--	------------------------	--

			30/PRT/2006 bagi difabel. Masjid ini dibangun setelah adanya Permen ini dan pengelolaanya dari awal sudah mulai sadar akan hak untuk prasarana bagi difabel di bangunan umum. Sehingga fasilitas yang ada di design sesuai kebutuhan yang diterapkan oleh Permen Pu No 30/PRT/2006.	
5	Akseibilitas Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Tunadaksa di Universitas Brawijaya	Jefri, T.	Universitas Brawijaya sebagai salah satu perguruan tinggi inklusi, hal ini yang membuat Universitas Brawijaya mencoba mulai memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi mahasiswa difabel di Universitas Brawijaya. Hal yang ditemui pada penelitian ini masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang di Universitas Brawijaya, khususnya toilet di Fakultas Ilmu Administrasi bagi difabel khususnya Tunadaksa, dimana toilet nya masih sangat minim ukurannya, sehingga kursi roda sulit untuk masuk.	Indonesia journal of disabilitly studies Vol;3 (2016)

6	Akseibilitas Penyandang Disabilitas di Halte dan Bus Trans Jogja di Yogyakarta	Dewi, P.N.R.	Akseibilitas yang ada di Bus Trans Jogja belum maksimal, bagi difabel pengguna kursi roda masih harus membutuhkan bantuan orang untuk mengangkatnya dikarenakan jarak antara	Jurnal UAJY Vol 2016
---	--	--------------	--	----------------------

			<p>halte dan pintu masuk bus yang cukup jauh. Pemerintah juga belum bisa memberikan aksesibilitas bagi difabel di bus trans jogja dan halte di karena permasalahan kurangnya lahan untuk memperluas halte. Hal ini membuktikan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjelaskan bahwa Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. 	
--	--	--	---	--

7	Kajian Akseibilitas Kaum Difabel pada Bangunan Gedung Pasar Aceh Berdasarkan Persepsi Masyarakat lansia dan Penyandang Cacat	Irfan., dkk	Pemenuhan akseibilitas di bangunan publik di Banda Aceh belum maksimal. Beberapa pihak serta masyarakat masih menganggap sepele mengenai hak difabel dan lansia di tempat umum. Pemenuhan hak Difabel dan lansia di bangunan public seperti Pasar Banda Aceh dimana sebagai pusat perbelanjaan seharusnya diperhatikan dengan baik guna membuat difabel lebih mandiri dalam beraktifitas. Penjelasan pada jurnal ini Pasar Banda Aceh belum	Jurnal teknik sipil universitas syiah kuala Vol;1 (2017)
---	--	-------------	---	--

			aksebilitas terhadap difabel, khususnya pengguna kursi roda. Maka masyarakat difabel belum dapat menerapkan kemandirian nya di tempat ini.	
8	Implementasi Pemenuhan Aksebilitas bagi Difabel (Penyandang Cacat) di Puskesmas Sleman	Evana, Maria.	Pemerintah Sleman sendiri terutama Dinas Kesehatan belum dapat memenuhi aksebilitas bagi difabel di Puskesmas di Sleman dikarenakan belum adanya dana yang sesuai untuk memenuhi aksebilitas tersebut. Pemerintah Kabupaten Sleman sendiri akhirnya baru bisa memberikan aksebilitas secara normal seperti pengobatan gratis serta pelatihan penggunaan kursi roda.	Jurnal UAJY. Vol 3; (2016)
9	Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta	Rahayu, S., dkk	Masyarakat difabel merasa masih belum terpenuhi hak nya akan fasilitas di publik, dimana di tempat publik masih terlalu mengagungkan orang normal tanpa memperdulikan kebutuhan akan mereka. Bahkan pusat rehabilitas dibangun bukan untuk menyetarakan mereka namun menjadikan mereka seolah-olah berbeda. Pelayanan publik di bidang transportasi untuk difabel di Yogyakarta masih minim, seperti angkutan kota masih	Jurnal ilmu-ilmu sosial Vol;10 (2013)

| | | berhenti sembarangan |

			tidak di halte. Hal ini membuat difabel kesulitan untuk naik/turun. Lantai di halte bus ataupun trans jogja dimana ramp nya cukup curam yang membuat difabel merasa tidak aman dan nyaman. Pintu masuk ke halte yang cukup sempit membuat pengguna kursi roda masih mengalami kesulitan mengaksesnya.	
10	Penerapan Standar Fasilitas Parkir untuk Difabel di RSUD Pasar Minggu	Amanta, N., dkk	Terdapat aturan Permenkes Republik Indonesia No 24 tahun 2016, bahwa bangunan rumah sakit harus dapat diakses oleh difabel. Namun di lapangan banyak ditemui belum diterapkan peraturan ini. Salah satunya RSUD Pasar Minggu. Standard fasilitas area parkir harus sesuai dengan kebijakan yang ada untuk memudahkan difabel untuk keluar masuk area parkir. Pada RSUD Pasar Minggu belum terdapat Ramp dan rambu yang ramah akan difabel. Hal utama yang terdapat di area parkir harus terdapat Ramp dan rambu untuk difabel.	Jurnal penelitian dan karya ilmiah lembaga penelitian universitas trisakti Vol;3 (2018)

Sumber : diolah oleh peneliti tahun 2019

1.6. Kerangka Teoritik

1.6.1. Evaluasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990; 2034) dalam (Rusli, 2015) bahwa evaluasi merupakan penilaian hasil. Sedangkan OECD (*The Organization for Economic Cooperation and Development*) dalam (Tanjung, 2018) mendefinisikan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang dapat menentukan sebuah nilai maupun penting sebuah kegiatan, atau suatu program. Evaluasi dapat dikatakan penilaian dari program, kegiatan, proyek, serta kebijakan, yang tengah berlangsung atau sudah berlangsung.

Menurut Griffin & Nix dalam (Tanjung, 2018) mengemukakan bahwa evaluasi didahului dengan suatu penilaian (*assessment*), lalu sebuah penilaian didahului dengan pengukuran, dimana sebuah pengukuran dijelaskan sebagai suatu kegiatan untuk membandingkan pengamatan dengan sebuah kriteria penilaian (*assessment*) yang ada. Kriteria penilaian ini merupakan kegiatan untuk menafsirkan dan menggambarkan hasil dari sebuah pengukuran, sedangkan evaluasi disini di peruntungkan untuk menentukan suatu nilai yang implikatif dari perilaku.

Menurut Croanbach dalam (Ratna, 2017) bahwa evaluasi adalah pemeriksaan secara sistematis terhadap segala peristiwa yang sudah terjadi atau terlaksananya sebuah program, sehingga evaluasi benar-benar dilaksanakan secara aturan sehingga mendapatkan hasil evaluasi yang baik untuk kedepannya. Lalu Wiliam Dunn menyatakan bahwa evaluasi disamakan dengan penafsiran, pemberian angka, dan penilaian. Wiliam Dunn dalam (Akbar & Mohi, 2018) juga mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu aktivitas guna menilai

tingkat pencapaian tujuan kebijakan.

Anderson (1975) dalam (Debby & Rares, 2015) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang menyangkut mengenai hal estimasi maupun penilaian sebuah kebijakan yang di dalamnya mencakup substansi, implementasi dan dampak. Pada hal ini dijelaskan pula bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja namun dilihat dari keseluruhan dari proses.

1.6.2. Jenis-jenis Evaluasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan evaluasi kebijakan, menurut Wirawan dalam (Irwan,2013) terdapat 5 jenis evaluasi berdasarkan obyek nya, yaitu:

1. Evaluasi Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu usulan ataupun rencana untuk melaksanakan fungsi serta tugas. Sebuah kebijakan akan berlangsung secara terus menerus hingga kebijakan tersebut di cabut atau diganti dengan kebijakan yang baru. Penggantian kebijakan dicabut biasanya dikarenakan kebijakan tersebut tidak efektif dalam pelaksanaannya ataupun ketika adanya pergantian pejabat. Ketika pergantian pejabat baru biasanya mereka memiliki kebijakan yang berbeda dengan pejabat sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk diadakanya perubahan kebijakan.

2. Evaluasi Progam

Progam merupakan sebuah kegiatan yang disusun guna menjalankan sebuah kebijakan yang ada. Sedangkan evaluasi progam merupakan sebuah teknik atau

cara yang dilakukan secara sistematis guna menganalisis sebuah program apakah masih efektif atau tidak untuk dijalankan. Evaluasi program ini dikelompokkan oleh Wirawan berupa, evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*), dan evaluasi akibat (*impact evaluation*).

3. Evaluasi Proyek

Evaluasi proyek merupakan sebuah kegiatan untuk menunjang berjalannya sebuah program yang akan dilaksanakan.

4. Evaluasi Material

Setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk menajalankan sebuah program ,kebijakan ataupun proyek pasti membutuhkan material-material tertentu. Contohnya dalam kasus ini untuk memenuhi sarana di tempat pariwisata memerlukan material untuk membangun tempat wisata atau yang lainnya.

5. Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Evaluasi sumber daya manusia sering juga dikatakan sebagai evaluasi kinerja. Fungsi dilaksanakan evaluasi sumber daya manusia agar kita mengetahui/memahami mengenai pengembangan dari sumber daya manusia yang tersedia.

1.6.3. Tipe-tipe Evaluasi

Untuk menentukan hasil dari evaluasi terdapat banyak kriteria berdasarkan para ahli. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Dunn (Asmara, 2009) dalam menentukan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang terdiri dari 6 (enam) tipe sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas berhubungan dengan sebuah alternatif mencapai hasil yang di harapkan atau tujuan dari di adakanya sebuah tindakan. Hal ini juga berhubungan dengan rasionalitas teknis, dimana diukur dengan unit produk atau layananan atau nilai moneteranya.

2. Efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas. Efisiensi biasanya di tentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

3. Kecukupan

Kecukupan merupakan tujuan yang telah dicapai sudah di rasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan juga berhubungan dengn seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat

memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

4. Kesamaan

Kesamaan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil di distribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat di artikan sebagai respon dari suatu aktivitas yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

1.6.4. Sarana dan prasarana pariwisata

Pariwisata berasal dari kata “pari” dan “wisata” dimana pari memiliki arti berulang-ulang dan wisata merupakan perjalanan atau bepergian. Maka dari itu pariwisata dapat dijelaskan bahwa perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan mengunjungi suatu tempat (Herlina, dkk. 2016).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam (Achmad, 2016) bahwa sarana adalah sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai terlaksananya sebuah makna dan tujuan, sedangkan prasarana segala sesuatu sebagai penunjang utama terselenggaranya sebuah proses. Sarana merupakan perlengkapan yang bisa dipindahkan kapan pun untuk mendukung kegiatan yang berlangsung. Secara umum sarana dan prasarana dijelaskan sebagai alat penunjang keberhasilan dari suatu proses yang dilakukan dalam pelayanan publik, jika sarana dan prasarana tidak tersedia maka kegiatan yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan lancar (Setiawan, 2011).

Sarana wisata adalah kelengkapan dari daerah tujuan wisata yang diperlukan guna melayani kebutuhan dari wisatawan ketika menikmati obyek wisata. Pengadaan sarana wisata antara obyek wisata satu dengan yang lainnya berbeda melihat kondisi obyek wisata (Prasetyo, 2016).

Prasarana Pariwisata menurut Suwanto dalam (Yoeti, 1996) merupakan sumber daya alam atau sumber daya buatan manusia yang benar-benar dibutuhkan oleh wisatawan yang mengunjungi obyek wisata seperti, listrik, jalan, air, jembatan, dll. Prasarana pariwisata juga dapat dikatakan sebagai seluruh fasilitas utama maupun dasar yang memungkinkan jika sarana kepariwisataan bisa berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada para wisatawan. Prasarana pariwisata pada kasus ini merupakan bangunan candi, ruang informasi, tempat parkir wisatawan, dll.

Menurut Lothar A. Kreck dalam (Herlina, 2016) bahwa sarana dan prasarana terdiri dari beberapa macam, berikut penjelasannya yaitu :

A. Prasarana, terdiri dari :

1. Prasarana perekonomian, dalam prasarana ini terbagi beberapa unsur antaranya :

a. Transportasi

Transportasi ini merupakan prasarana yang membuat wisatawan dari negara atau daerah asalnya menuju negara atau daerah yang akan mereka tuju untuk berwisata

b. Komunikasi

Tersedianya layanan komunikasi sehingga wisatawan dengan mudah berkomunikasi dengan pihak luar saat berwisata

c. Kelompok yang termasuk “UTILITIES”

Dalam hal ini adalah penerangan listrik, system irigasi dan persediaan air minum

d. System perbankan

Dengan tersedianya prasarana ini maka wisatawan dengan mudah untuk mengambil ataupun mengirim uang dan dapat menukarkan uang pada fasilitas *money changer* untuk wisatawan mancanegara.

2. Prasarana sosial

Prasarana ini merupakan penunjang prasarana perekonomian berjalan. Ada beberapa yang masuk dalam kelompok ini yaitu :

a. Pelayanan pendidikan

Adanya pelayanan pendidikan formal di sekitar tempat wisata.

b. Pelayanan kesehatan

Adanya jaminan kesehatan untuk wisatawan dalam berwisata atau tersedia layanan kesehatan terdekat pada obyek wisata tersebut

c. Faktor keamanan

Pihak pengelola wisatawan harus menjamin keamanan bagi wisatawan nya baik di tempat wisata tersebut ataupun daerah sekitar

d. Petugas yang langsung melayani wisatawan

Petugas yang dimaksud seperti, polisi, petugas kesehatan, petugas beacukai dan pejabat-pejabat yang berkaita

3. Prasarana kepariwisataan

a. *Receptive Tourism Plan*

Merupakan bentuk badan usaha atau organisasi yang kegiatannya mempersiapkan kedatangan wisatawan pada sebuah daerah tujuan wisata

b. *Residential Tourism Plan*

Merupakan semua fasilitas yang bisa di gunakan untuk menampung atau di jadikan tempat tinggal sementara bagi wisatawan di daerah tujuan wisata

c. *Recreative and Sportive Plan*

Merupakan fasilitas yang tersedia yang dapat digunakan untuk rekreasi dan olahraga

B. Sarana kepariwisataan terbagi atas :

1. Sarana pokok kepariwisataan

Merupakan sebuah perusahaan yang tergantung dengan kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata guna melangsungkan kehidupan perusahaanya, seperti travel agent, hotel, perusahaan transportasi wisata, rumah makan, obyek wisata dll.

2. Sarana pelengkap kepariwisataan

Perusahaan atau tempat yang menyediakan fasilitas berupa tempat untuk rekreasi yang fungsinya untuk melengkapi sarana pokok kepariwisataan agar dapat lebih lama tinggal pada daerah tujuan wisata. Seperti alat olahraga, lapangan golf, kolam renang dll.

3. Sarana penunjang pariwisata

Perusahaan atau tempat yang tidak hanya melengkapi sarana pokok dan pelengkap kepariwisataan agar lebih lama untuk berwisata tetapi juga membuat wisatawan untuk lebih banyak mengeluarkan uang dan bertransaksi atau membelanjakan uang yang dimiliki .

Berikut ini standar kelayakan yang ditetapkan pemerintah untuk menjadikan sebuah daerah menjadi daerah tujuan wisata. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di antara nya

Tabel 1.4 Standar kelayakan menjadi daerah tujuan wisata

No	Kriteria	Standar minimal
1	Objek	Tersedia dari salah satu unsur budaya, social serta alam
2	Akses	Tersedia jalan, rute yang mudah, tempa parkir serta harga parkir terjangkau
3	Akomondasi	Tersedinya pelayanan penginapan baik hotel, wisma ataupun losmen
4	Fasilitas	Tersedia tempat perbelanjaan, pusat infomasi, pemadam kebakaran, kesehatan, <i>guiding</i> (pemandu wisata), plang informasi serta adanya petugas yang mengecek di pintu masuk dan keluar
5	Transporatasi	Tersedia tranportasi lokasi yang <i>variative</i> dan nyaman yang mengakses tempat tersebut
6	<i>Carering Service</i>	Tersedia pelayanan makanan serta minuman
7	Aktivitas rekreasi	Adanya aktivitas yang dapat di lakukan pada lokasi wisata
8	Perbelanjaan	Tersedia tempat untuk belanja barang-barang umum

9	Komunikasi	Tersedia telephone umum, TV, Signal seluler, radio dan tempat yang berjualan voucher
10	Sistem perbankan	Adanya bank dan ATM atau sejenisnya
11	Kesehatan	Rumah sakit / puskesmas dan sejenisnya
12	Keamanan	Tersedia jaminan keamanan untuk wisatawan (polisi, satpam, ataupun rambu-rambu perhatian)
13	Kebersihan	Tersedia tempat sampah dan rambu mengenai peringatan kebersihan
14	Sarana ibadah	Adanya salah satu sarana untuk beribadah wisatawan
15	Sarana olahraga	Tersedia salah satu alat atau perlengkapan untuk berolahraga
16	Sarana pendidikan	Tersedia sarana pendidikan formal

1.6.5. Difabel

Difabel atau *Different Abled People* sering kita gunakan untuk orang-orang yang memiliki kelebihan pada dirinya, seperti orang yang tidak memiliki tangan sehingga kelebihan mereka adalah ketika akan menulis dan menggambar menggunakan kaki, itu merupakan kelebihan dari difabel, karna hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang normal pada umumnya. Kata difabel mulai muncul di Yogyakarta dengan digagas oleh seorang aktivis bernama Mansour Fakhri, menurut beliau kata “*difabel*” lebih manusiawi digunakan untuk menggantikan kata penyandang cacat. Mulai tahun 1998 kata “*difabel*” diperkenalkan dan hingga hari ini banyak orang, penulis ataupun media mulai menggunakan kata “*difabel*” untuk mengganti penyebutan penyandang cacat (Agnes, 2014).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa difabel merupakan orang yang memiliki sesuatu kekurangan pada dirinya yang menyebabkan dirinya kurang sempurna, hal ini bisa karena kecelakaan maupun bawaan dari lahir. Sedangkan di dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008 kota Surakarta tentang Kesetaraan Difabel dikatakan bahwa :

“Difabel adalah setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan yang selayaknya terdiri dari (1) Penyandang cacat fisik (2) Penyandang cacat mental (3) Penyandang cacat fisik & mental.”

Declaration of The Rights of Disabled Person (1975) mendefinisikan kata difabel yaitu ;

“Seseorang yang tidak dapat menjamin keseluruhan atau sebagian kebutuhan dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan manusia pada normalnya dan/atau kemampuan mentalnya.”

Jenis-jenis masyarakat yang tergolong difabel adalah (Napitupulu, 2013):

- a. Cacat Fisik, yang termasuk dalam golongan ini yaitu orang yang anggota fisiknya kurang lengkap ketika di amputasi, lumpuh, cacat tulang ataupun cacat sendi.
- b. Cacat Rungu Wicara, yang termasuk dalam tipe ini yaitu orang yang mempunyai keterbatasan dalam hal pendengaran atau mamahami apa yang di katakan oleh orang lain dengan jarak mulai dari 1 meter tanpa alat bantu dengar atau sejenisnya serta memiliki hambatan untuk berkomunikasi ke orang lain.
- c. Cacat Mata, yang termasuk tipe ini yaitu orang yang memiliki hambatan atau keterbatasan dalam hal penglihatan.

- d. Cacat Mental Eks-psilotik, orang yang mengalami kelainan jiwa yang penyebabnya adalah faktor organik, biologis maupun fungsional yang mengakibatkan perubahan dalam pikirannya akan perasaan dan perbuatan seseorang.
- e. Cacat Mental Retardasi, yang termasuk tipe ini yaitu, orang yang bisa dikatakan idiot. Perilaku penderita ini biasanya seperti anak berumur 2 tahun dan wajahnya mirip dengan penderita idiot lainnya. Cacat jenis ini juga memiliki emosi yang kurang dapat terkontrol sehingga memerlukan pengawasan yang lebih.

Adapun penyebab orang mengalami difabel, yaitu (Napitupulu,2013) :

- a. Bawaan lahir

Pada penderita difabel yang sudah dari lahir biasanya saat di kandungan penderita kekurangan nutrisi ataupun asam folat, sehingga menyebabkan kecacatan pada otak, sum-sum tulang belakang atau kecacatan fisik.

- b. Kecelakaan

Pada penderita difabel yang di akibatkan kecelakaan bisa menjadi orang mengalami kecacatan fisik seperti tangan harus di amputasi atau lainnya, ataupun kelainan mental dikarenakan trauma yang dialami saat terjadi kecelakaan tersebut.

- c. Kejadian yang menyebabkan orang trauma

Terdapat beberapa orang yang menderita difabel disebabkan sesuatu hal yang menyebabkan besarnya trauma pada seseorang sehingga stres sehingga sikisnya terkena akhirnya mengalami gangguan jiwa.

1.6.6. Sarana dan prasarana pariwisata ramah difabel

Difabel merupakan masyarakat Indonesia yang memiliki kewajiban dan kesempatan yang sama seperti masyarakat normal lainnya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada bagian kedua belas tentang hak kebudayaan dan pariwisata pada point (b) di jelaskan bahwa difabel memiliki hak :

“Memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pengembangan pariwisata”

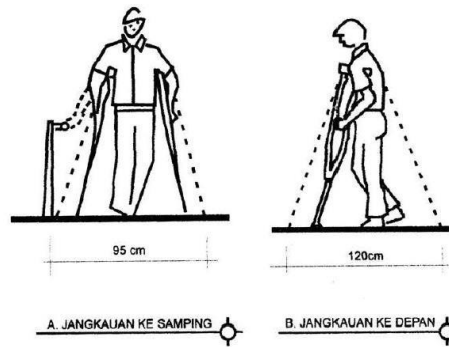
Maka dari itu difabel memiliki hak untuk berwisata. Difabel dalam dunia pariwisata juga memiliki hak untuk mendapatkan kebutuhan berupa sarana dan prasarana pariwisata yang dapat mereka akses sesuai kebutuhan mereka. Hal ini di jelaskan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas point (c) bahwa :

“Mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan”

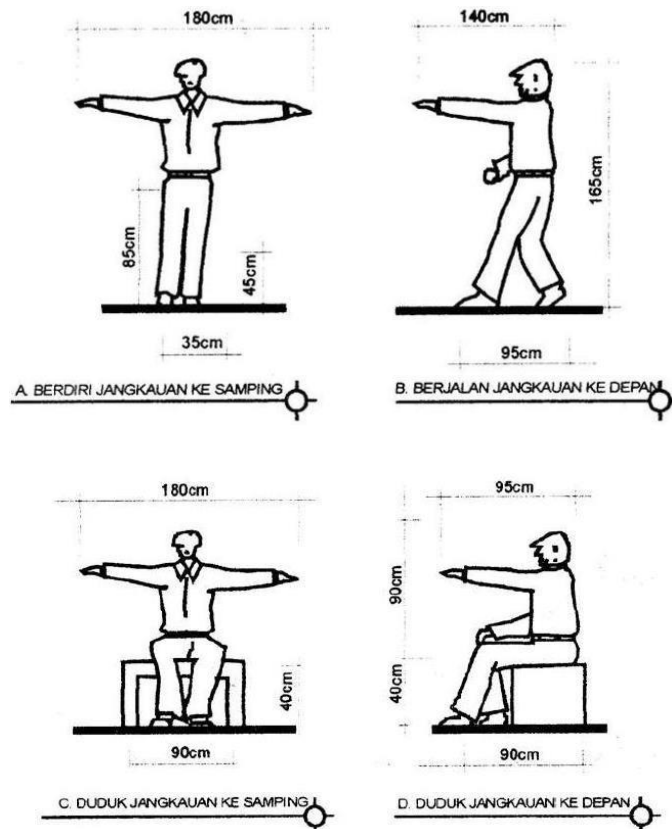
Aturan mengenai sarana dan prasarana pada bangunan umum dan lingkungan diatur pada Permen Pu Nomor 30/PRT/2006 dimana pada bab 1 ketentuan umum dijelaskan bahwa jenis bangunan umum wisata dan rekreasi harus menerapkan peraturan ini. Pada peraturan ini diatur mengenai aturan teknis dalam pembangunan bangunan umum dan lingkungan dan salah satu bangunan wisata seperti:

- a. **Ukuran dasar ruang**, ukuran dasar ruangan tiga dimensi (panjang, lebar, serta tinggi) berpacu pada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan dan ruang yang

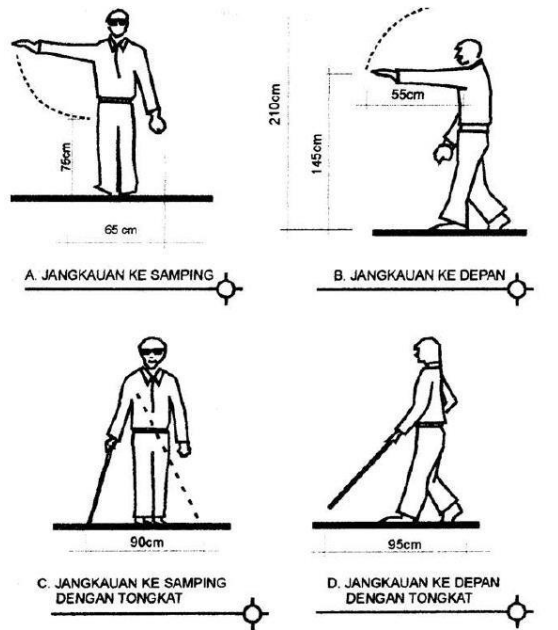
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pergerakan penggunanya. Berikut aturan ukuran dasar ruang pada bangunan umum dan lingkungan:



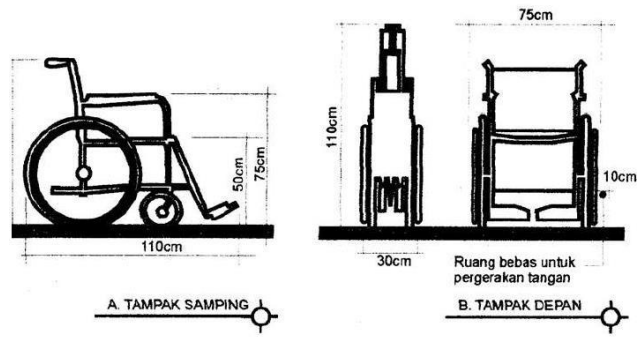
Gambar 1.1 Ruang gerak pengguna kruk



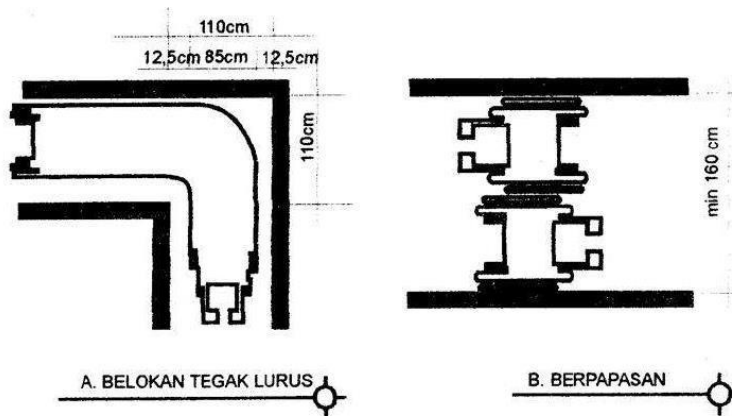
Gambar 1.2 Ruang gerak ukuran umum orang dewasa



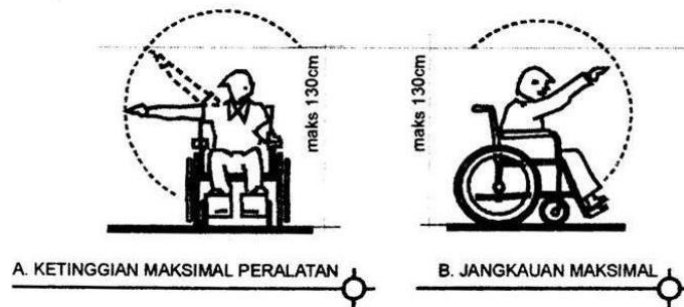
Gambar 1.3 Ruang gerak bagi tuna netra



Gambar 1.4 ukuran kursi roda



Gambar 1.5 Ukuran belokan dan papasan kursi roda



Gambar 1.6 Rata-rata batas jangkauan kursi roda

b. **Area parkir**, pada tempat parkir kendaraan dan daerah untuk naik-turun bagi kendaraan difabel

Syarat area parkir :

- i. Tempat parkir difabel terletak pada rute terdekat maksimal 60 m ke obyek yang di tuju
- ii. Tempat parkir jika tidak terhubung langsung dengan bangunan, maka posisi parkir dekat dengan pintu masuk dan jalur pedestrian

iii. Area parkir ini memiliki ruang bebas untuk naik dan turun pengguna kursi roda

iv. Terdapat rambu parkir difabel

- c. **Jalur Pedestrian**, jalur yang dilalui untuk difabel berjalan kaki atau kursi roda harus aman, nyaman serta tidak terhalang.

Persyaratan :

- i. Permukaan jalan stabil, bertekstur halus, tidak licin, tahan segala cuaca serta terhindar dari gundukan / sambungan
- ii. Perbandingan 1:8 untuk kemiringan
- iii. Tersedia tempat duduk di sepanjang pedestrian untuk beristirahat difabel
- iv. Adanya perawatan
- v. Maksimal kedalaman drainase 1,5 cm dan peletakan lubang jauh dari drainase
- vi. Minimum lebar pedestrian 120 cm untuk satu jalur dan 160 cm untuk dua jalur.

Tidak ada pohon, tiang, gorong-gorong, ataupun benda lain yang menghalangi

- d. **Jalur Pemandu**, jalur yang digunakan untuk pejalan kaki maupun difabel terdapat panduan arah ke tempat-tempat tertentu

Persyaratan :

- i. Terdapat garis-garis arah perjalanan pada ubin
- ii. Terdapat ubin bulat sebagai pemberitahuan perubahan situasi
- iii. Tersedia *guiding blocks* pada jalur lalu lintas kendaraan, pintu masuk keluar terminal atau halte, pada sepanjang jalur pedestrian yang menghubungkan jalan dan bangunan.
- iv. Tersedia pemandu arah menuju lokasi pemberhentian transportasi umum terdekat

- e. **Kamar kecil**, terdapat fasilitas yang dapat mengakomodasi difabel

Syarat kamar kecil :

- i. Adanya rambu tentang difabel di luar yang bersifat timbul
 - ii. Tersedia ruang gerak yang cukup untuk keluar dan masuk pengguna kursi roda
 - iii. Kloset memiliki tinggi yang setara dengan tinggi kursi roda yaitu 45 – 50 cm
 - iv. Terdapat pegangan tangan dengan tinggi sesuai kursi roda dan bisa diakses oleh semua difabel
 - v. Posisi pengering tangan, tissue, shower, dan kran sesuai dengan ketinggian yang bisa di akses oleh semua difabel. Kran pada wastafel juga menggunakan system pengukit.
 - vi. Pintu harus mudah dibuka dan ditutup oleh difabel dan kunci pada toilet dipasang dan dipilih yang mudah dibuka dari luar saat dalam keadaan darurat.
- f. **Lift**, alat mekanis-elektris yang digunakan untuk pergerakan vertikal di dalam bangunan.

Syarat lift :

- i. Tersedia 1 lift pada bangunan gedung dengan 5 lantai, kecuali rumah sakit atau bangunan dengan kebutuhan khusus
- ii. Maksimum toleransi perbedaan antara muka lantai bangunan dengan ruang 1,25 cm
- iii. Tersedianya area yang luas untuk pengguna lift yang akan keluar
- iv. Tersedia nya tombol yang mudah dijangkau dengan ketinggian 90-120 cm dari muka lantai, dan dilengkapi dengan fasilitas *braille* serta ada fasilitas *visual*.

- v. Ukuran ruang lift minimal 140cm x 140 cm dan harus dapat diakses oleh pengguna kursi roda, mulai masuk, gerakan memutar, lalu untuk menjangkau tombol dan keluar.
- vi. Pada ruang lift terdapat pegangan rambat di kedua sisi dan terdapat sarana dan alat informasi menyesuaikan perkembangan teknologi informasi yang ada, lalu pada dinding lift ada pantulan bayangan ke pintu sebagai cermin.
- g. **Pancuran/shower**, fasilitas mandi dan pancuran yang mengakomodasi kebutuhan *difabel*.

Persyaratan :

- i. Bilik pancuran memiliki lebar dan tinggi sesuai dengan difabel pengguna kursi roda
- ii. Terdapat pegangan rambat untuk bertumpu
- iii. Terdapat tombol alarm atau sejenisnya yang dapat dijangkau saat keadaan darurat
- iv. Terdapat kunci pada pintu yang bisa dan mudah dibuka dari luar saat keadaan darurat
- v. Pintu pada tempat ini menggunakan pintu bukaan keluar
- vi. Kran menggunakan system pengukit
- h. **Perlengkapan & Peralatan**, semua perlengkapan dan peralatan bangunan seperti alarm, tombol/stop kontak, dan pencahayaan.

Persyaratan :

- i. Sistem alarm atau peringatan
 - Adanya *vocal alarm* dan *vibrating alarm*, lalu penunjuk untuk melarikan diri saat dalam keadaan darurat

- Stop kontak dipasang dekat dengan tempat tidur
- Alat-alat pengontrol listrik dapat dioperasikan dengan satu tangan dan tidak diperlukan pegangan yang kencang
- ii. Pemasangan tombol dan stop kontak di pasang dengan tinggi yang mudah dijangkau oleh difabel.
- i. **Pintu**, tempat masuk keluar halaman atau bangunan yang mengakomodasi kebutuhan bagi *difabel*.

Persyaratan :

- i. Untuk pintu pagar ke tapak bangunan mudah untuk dibuka serta ditutup difabel
- ii. Lebar pintu utama minimal 90 cm dan pintu yang tidak begitu penting 80 cm, kecuali pintu rumah sakit 90 cm
- iii. Pada pintu masuk tidak ada ramp
- iv. Pintu yang tidak di anjurkan yaitu , pintu geser, pintu berat, pintu yang memiliki dua daun pintu dan berukuran kecil, pintu 2 arah untuk masuk dan keluar, dan pintu yang memiliki pegangan susah di akses oleh tuna netra
- v. Pada pintu otomatis harus peka ketika ada kebakaran dan tidak cepat untuk menutup kembali
- vi. Lantai pintu menggunakan bahan yang tidak licin
- vii. Terdapat plat landing dibawah pintu untuk tuna daksa
- j. **Rambu**, tanda-tanda bersifat *verbal* (dapat didengar), bersifat *visual* (dapat dilihat), atau tanda-tanda yang dapat dirasa atau diraba.

Persyaratan :

- i. Penggunaan utama yang digunakan :
 - Arah dan tujuan jalur pedestrian
 - Kamar mandi / toilet umum dan telephone umum
 - Parkir khusus difabel
 - Nama fasilitas dan tempat yang ada, serta ATM
- ii. Persyaratan rambu yang digunakan :
 - Rambu bersifat *braile*
 - Rambu gambar dan symbol sebaiknya dengan cetak timbul
 - Rambu berupa tanda dan symbol international
 - Metode khusus seperti pengerasan tanah, warna kontras, dll
 - Bahan material tidak silau dan warna kontras dengan latar belakang nya
 - Rasio lebar dan tinggi huruf atau karakter yaitu 3 : 5 dan 1 : 1 dan tebal huruf 1 : 5 dan 1 : 10
 - Untuk tinggi huruf atau angka sesuai dengan jarak pandang dari rambu itu dibaca
- iii. Lokasi penempatan yang tepat :
 - Tidak ada penghalang
 - Terdapat di lingkungannya
 - Cukup mendapatkan pencahayaan baik saat terang / gelap
 - Tidak mengganggu pejalan kaki
- k. **Ramp**, jalur jalan yang memiliki kelandaian tertentu sebagai pengganti anak tangga.

Persyaratan :

- i. Kemiringan maksimal 7^0 pada dalam bangunan dan 6^0 diluarbangunan

- ii. Perbandingan tinggi dan kelandaian panjang mendatar 1 : 8 tidak boleh lebih dari 900 cm
- iii. Lebar minimum 95 cm tanpa pengaman dan 120 cm dengan tepi pengaman
- iv. Muka datar pada awalan dan akhiran ram harus datar dan bebas sehingga memudahkan untuk memutar pengguna kursi roda, lalu memiliki tekstur dan tidak licin ketika terkena hujan
- v. Untuk lebar tepi pengaman 10 cm yang berfungsi untuk keamanan pengguna kursi roda
- vi. Terdapat penerangan
- vii. Terdapat pegangan rambat
 - l. **Tangga**, fasilitas bagi pergerakan *vertical* di rancang mempertimbangkan ukuran serta kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai.
Syarat tangga :
 - i. Memiliki pijakan dan tanjakan yang seragam
 - ii. Tidak adanya lubang dan dilengkapi dengan pegangan tangan pada salah satu sisi atau keduanya
 - iii. Pegangan tangan harus mudah dipegang dan memiliki ketinggian 65 – 80 cm dari muka lantai
 - iv. Pada tangga yang tersedia pada area luar bangunan, di usahakan untuk tidak dapat menggenang air hujan di lantai
 - m. **Westafel**, fasilitas untuk cuci tangan, cuci muka , ataupun bergosok gigi yang memiliki ruang gerak yang mudah, serta ketinggiannya dapat dijangkau semua pengguna kursi roda. Kran yang digunakan pun harus dengan system pengukit.

Tersedia cermin bisa yang bisa diakses oleh semua difabel. Tersedia ruang gerak kaki pengguna kursi roda pada bawah westafel dan ruang gerak di depan westafel.

- n. **Perabotan**, penataan layout barang-barang furniture harus memberikan ruang gerak yang cukup untuk difabel.
- i. Perabotan yang tersedia di bangunan umum harus bisa diakses oleh difabel
- ii. Pada bangunan yang digunakan untuk masyarakat banyak, seperti balai pertemuan dan sejenisnya, diharuskan memiliki tempat duduk dengan ketentuan :

Tabel 1.5 ketersediaan tempat duduk pada bangunan umum

Kapasitas total tempat duduk	Jumlah tempat duduk yang aksesibilitas
4-25	1
26-50	2
51-300	4
301-500	6
>500	6, + 1 untuk setiap ratusan

Sumber : Permen PU No 30/PRT/2006

- o. **Telephone**, peralatan komunikasi pada tempat umum dengan memiliki ketinggian yang sesuai untuk pengguna kursi roda, menggunakan tombol tekan, dan terdapat telephone teks untuk tuna netra.

Penjelasan di atas adalah gambaran kebutuhan sarana dan prasarana untuk difabel pada bangunan umum atau tempat wisata. Difabel terdiri dari banyak jenis sehingga kebutuhan sarana serta prasarana difabel saat berwisata antara yang satu dengan lainnya berbeda.

1.7. Definisi Konseptual

1. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai secara sistematis sebuah kegiatan atau program yang sedang berjalan atau yang sudah dilaksanakan untuk memperbaiki kegiatan atau program tersebut kedepannya.
2. Sarana dan prasarana pariwisata merupakan fasilitas yang disediakan oleh pengelola tempat wisata untuk menunjang adanya kegiatan berwisata pada tempat wisata.
3. Difabel merupakan perbaikan penyebutan kata dari kata “penyandang cacat”. Kata difabel lebih manusiawi untuk menggambarkan orang-orang yang memiliki kelaianan atau kekurangan pada tubuhnya baik fisik maupun mental.
4. Sarana dan Prasarana Pariwisata Ramah Difabel merupakan sebuah fasilitas yang harus disediakan oleh pengelola pariwisata di tempat wisata guna mewujudkan kemandirian bagi difabel dan difabel juga dapat merasakan wisata dengan aman dan nyaman.

1.8. Definisi Operational

1. Evaluasi

Untuk menilai evaluasi pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Dunn dalam (Asmara, 2009) kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang terdiri dari 6 (enam) tipe sebagai berikut :

Tabel 1.6 Definisi Operational

No.	Kriteria	Indikator
1	Efektivitas	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan persyaratan teknis yang tertera pada Perda Sleman No 11 tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan bagi Difabel2. Terdapat masyarakat yang berkunjung ke tempat ini
2	Efisiensi	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya upaya pihak pengelola untuk meningkatkan dan melengkapi kualitas sarana dan prasarana bagi difabel di Candi Ratu Boko2. Adanya upaya pihak pengelola untuk merawat sarana dan prasarana ramah difabel yang sudah tersedia
3	Kecukupan	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya penambahan sarana dan prasarana bagi difabel pada obyek wisata Candi Ratu Boko pada tahun 2017-2018
4	Kesamarataan	<ol style="list-style-type: none">1. Harga untuk pengunjung difabel tidak dibedakan atau lebih mahal dari pengunjung biasa2. Tersedianya semua kebutuhan sarana dan prasarana bagi semua jenis difabel di seluruh area obyek wisata Candi Ratu Boko
5	Responsivitas	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelola Candi Ratu Boko merespon keluhan atau kritik serta saran mengenai sarana dan prasarana bagi wisatawan difabel
6	Ketepatangunaan	<ol style="list-style-type: none">1. Wisatawan difabel merasa nyaman dan aman ketika berwisata di Candi Ratu Boko

Sumber: diolah oleh penulis (2019)

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata dalam (Ningrum, 2015) bahwa penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau peristiwa secara nyata dan apa adanya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai kejadian-kejadian (Sumadi, 2010).

Penelitian kualitatif menurut Sukmadinata dalam (Ningrum, 2015) bahwa penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisa peristiwa, aktivitas sosial, kejadian, sikap, persepsi, dan orang secara individu maupun kelompok. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti akan menulis penelitian deskriptif kualitatif dikarenakan penelitian ini akan menjelaskan dan menggambarkan analisa data berupa kata-kata dan tulisan serta menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya mengenai sarana serta prasarana untuk difabel pada tempat wisata Candi Ratu Boko.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di kabupaten Sleman tempat nya pada tempat wisata budaya, yaitu Candi Ratu Boko.

1.9.3. Unit Analisa

Unit analisa pada penelitian ini adalah pengelola Candi Ratu Boko yaitu PT.

Taman Candi Wisata Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Unit Ratu Boko.

1.9.4. Jenis dan Sumber data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapat dari lapangan atau tempat penelitian. Peneliti mendapatkan data atau informasi langsung dengan memakai instrument-instrumen yang telah ditentukan. Menurut Indriantoro dan Supomo dalam (Khafid, 2015) bahwa data primer dianggap lebih akurat, dikarenakan penyajian data ini lebih terperinci. Penulis pada penelitian ini menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung terkatit evaluasi sarana dan prasarana ramah difabel pada tempat wisata Kabupaten Sleman tahun 2017-2018 (studi kasus Candi Ratu Boko).

Tabel 1. 7 Data Primer Penelitian

No	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Jumlah pengunjung Difabel Candi Ratu Boko 2017-2018	Wiharjanto (<i>General Manager</i> Candi Ratu Boko)	Wawancara
2.	Data sarana dan prasarana untuk difabel yang terdapat di Candi Ratu Boko	Wiharjanto (<i>General Manager</i> Candi Ratu Boko) Sigit (bagian pelayanan ticketing) Retno (<i>Manager administrasi & umum</i>)	Wawancara dan observasi
3.	Data kritik dan saran yang masuk ke pihak pengelola mengenai sarana dan prasarana untuk difabel di Candi Ratu Boko	Wiharjanto (<i>General Manager</i> Candi Ratu Boko)	Wawancara

4.	Sejauh mana pihak pengelola candi ratu boko merespon saran dan kritik mengenai	Wiharjanto (<i>General Manager</i> Candi Ratu Boko) Sigit (bagian pelayanan	Wawancara
----	--	---	-----------

	pengadaan sarana dan prasarana ramah difabel di Candi Ratu Boko	ticketing) Retno (<i>Manager administrasi & umum</i>)	
5.	Data sarana dan prasarana yang dibangun pada tahun 2017-2018	Sigit (bagian pelayanan ticketing) Retno (<i>Manager administrasi dan umum</i>)	Dokumentasi
6.	Tanggapan wisatawan difabel dan keluarga wisatawan difabel di Candi Ratu Boko mengenai sarana dan prasarana bagi difabel di Candi Ratu Boko	Ragil (Tunadaksa) Rahma (Tunadaksa) Wati (Tunawicara) Tina (ibu wisatawan Tunawicara) Sugi (keluarga wisatawan Tunanetra)	Wawancara
7.	Tanggapan wisatawan normal di Candi Ratu Boko mengenai sarana dan prasarana untuk difabel di Candi Ratu Boko	Marti Nita Cholida	Wawancara

b. Data Sekunder

Menurut Sugiono dalam (Kurnia, 2016) sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, sehingga data yang di dapat peneliti melalui perantara lain contohnya orang lain, dokumen, jurnal. Data sekunder dapat kita dapatkan dengan cara membaca, memahami, serta mempelajari dari sumber-sumber lain yang dapat dijadikan sebagai literatur seperti buku, jurnal, thesis, skripsi, dll.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono dalam (Ningrum, 2015) bahwa “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari

penelitian adalah mendapatkan data”.

a. Wawancara

Menurut nazir dalam (Ummul, 2008) wawancara merupakan proses untuk memperoleh penjelasan untuk sebuah penelitian dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara tatap muka antara si penanya dan peneliti dengan menggunakan Interview guide/ panduan wawancara. Dalam penelitian ini sasaran narasumber yang akan diwawancarai meliputi :

Tabel 1.8 Daftar Narasumber Pelitian

No	Nama Narasumber	Jabatan	Instansi
1	Wiharjanto	General Manager	Pt. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko unit Ratu Boko
2.	Sigit	Pelayanan Tiketing	Pt. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko unit Ratu Boko
3.	Retno	Manager Administrasi & umum	Pt. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko unit Ratu Boko
4	Ragil	Wisatawan Tunadaksa pengguna kruk	
5	Rahma	Wisatawan Tunawicara pengguna kursi roda	
6.	Wati	Wisatawan Tunawicara	
7.	Tina	Ibu dari wisatawan Tunawicara	
8.	Sugi	Wisatawan yang memiliki keluarga	

		Tunanetra	
9	Marti	Wisatawan normal	
10	Nita	Wisatawan normal	
11	Cholida	Wisatawan normal	

b. Dokumentasi

Arikunto dalam (Ningrum, 2015) mengemukakan bahwa metode Dokumentasi itu mencari data yang berhubungan dengan variabel yang meliputi catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data pada penelitian dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen berisi data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Seperti pada penelitian ini, peneliti membutuhkan dokumen-dokumen berisi data dari Pt. Taman Wisata Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko unit Ratu Boko.

c. Observasi

Observasi menurut Nawawi dan Martini dalam (Anisah, 2013) merupakan sebuah teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada obyek yang akan diteliti. Maka pada penelitian ini peneliti dapat mengetahui bagaimana sarana dan prasarana yang ada pada Candi Ratu Boko.

1.9.6. Teknik Analisa Data

Suatu proses penyelidikan serta pengaturan yang dilakukan secara sistematis

transkrip wawancara, catatan lapangan, serta materi lainya yang peneliti lakukan

untuk meningkatkan pemahaman peneliti tersebut dan memudahkan peneliti menjelaskan apa yang ditemukan olehnya kepada orang lain (Emzir,2010).

Menurut Miles dan Huberman dalam (Emzir, 2010) terdapat tiga kegiatan dalam analisi data kualitatif, yaitu :

1. Reduksi data, kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraks dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi ketika penulis mencatat di lapangan.
2. Penyajian Data (Data Display), merupakan deksripsi dari kumpulan informasi yang tersusun sehingga memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengamblan tindakan. Penyajian yang akan digunakan berbentuk teks naratif.
3. Penarikan/*Verifikasi* Kesimpulan, dimulai dari reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan/*verifikasi* harus teratur; inisiatif berada di tangan peneliti; dalam menyimpulkan telah dimulai sejak awal. Ketika proses sudah benar dan data yang di analisa telah memenuhi standar kelayakan dan kofomitas, jadi keismpulan awal dapat dipercayai. Ketiga ini (reduksi data, *display*, dan penarikan kesimpulan) merupakan saling berhubungan. Kesimpulan menuntut *verifikasi* oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain perlu juga untuk diingat bahwa menambah data, berarti perlu dilakukan lagi reduksi data *display* data dan penarikan kesimpulan berikutnya.

